

## ANALISIS KESETARAAN GENDER DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KELOMPOK AFINITAS MANDIRI PROGRAM PIDRA

**Dwi Retno Andriani<sup>1</sup> dan Yekti Trisula<sup>2</sup>**

<sup>1)</sup> Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

<sup>2)</sup> Alumni Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Masyarakat yang aktif dan kuat merupakan kunci menuju sebuah kualitas hidup yang lebih baik bagi setiap orang untuk memegang kontrol di dalam komunitas mereka. Bagi masyarakat, memegang kontrol adalah tentang bagaimana masyarakat mampu membuat keputusan bagi diri mereka sendiri mengenai sesuatu yang penting bagi mereka. Juga tentang orang yang secara bersama melakukan sesuatu yang memenuhi sebuah kebutuhan yang nyata di dalam masyarakat mereka dengan cara yang terbuka, inklusif dan demokratis.

Program *Participatory Integrated Development in Rainfeed Areas* (PIDRA), khususnya sub program pengembangan masyarakat dan gender merupakan program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya, meningkatkan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan, terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan dan usahatani kelompok dan partisipasi wanita untuk mewujudkan ketahanan pangan di pedesaan. Program PIDRA dilaksanakan pada tahun 2001-2008 yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I pada tahun 2001-2004 dan tahap II pada tahun 2005-2008.

Kemandirian kelompok merupakan suatu kondisi dimana kelompok sudah mandiri. Kemandirian ini dapat dilihat pada kelompok dengan yang mempunyai karakteristik seperti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya, menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anggota untuk memainkan peranan dan menjadi bagian dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, dalam setiap proses pembelajaran dan dalam setiap upaya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidup mereka, menyediakan kesempatan belajar bagi semua anggota untuk mengembangkan praktek demokrasi yang sehat, mampu membawa seluruh anggotanya keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu. Permasalahan umum yang diakibatkan karena kesenjangan gender atau ketimpangan gender seperti, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan kontrol atas sumberdaya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan.

Gambaran umum tentang kondisi objektif perempuan masih memprihatinkan. Pertama, di bidang kesehatan, tenaga medis dan paramedis perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Kedua, bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama antara perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh, tetapi pada

pendidikan tingkat menengah keatas dan pendidikan tinggi mulai tampak perbedaan, dimana laki-laki lebih memperoleh kesempatan. Ketiga, dibidang ekonomi dan pekerjaan, partisipasi perempuan hanya 43,5 % yang terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan segala sektor, sedangkan sisanya tidak memperoleh kesempatan memiliki pekerjaan. Keempat, struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat belum mendukung terciptanya kesetaraan gender. Kelima, di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih rendah.

Tujuan pelaksanaan analisis gender adalah dalam rangka melihat perkembangan akhir pengarusutamaan gender dalam setiap faktor kehidupan, termasuk tingkat partisipasi, akses dan kontrol terhadap sumber daya dan proses pembangunan. Perkembangan analisis gender pasca program PIDRA tidak menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, kondisi dilapangan masih sama dengan kondisi per akhir Desember 2008. Untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi, strategi pengarusutamaan gender (PUG) diterapkan. Strategi ini bertujuan untuk mengakomodir perbedaan aspirasi, pengalaman, permasalahan dan kebutuhan laki-laki maupun perempuan sebagai penerima manfaat program PIDRA.

Pembelajaran penerima manfaat Program PIDRA telah memunculkan kader-kader pemimpin baru ditingkat penerima manfaat. Pembelajaran yang telah diterima oleh penerima manfaat perempuan lewat keaktifan mereka dalam kelembagaan binaan program telah mendorong perempuan untuk tampil di forum ditingkat desa. Sumber daya manusia hasil gembelngan PIDRA telah mulai dipercaya masyarakat untuk tampil mewakili RT, dusun, desa, bahkan sampai mencapai kecamatan. Walaupun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi kaum laki-laki masih tetap lebih besar daripada perempuan dalam hal penentuan kebijakan ditingkat desa.

Kesenjangan akses laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan di LPD, lebih disebabkan karena stereotype laki-laki yaitu kaum yang lebih kompeten dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan fisik. Kalaupun perempuan dilibatkan, maka mereka cenderung dilibatkan sebagai penyedia konsumsi. Dominasi laki-laki di LPD berdampak pada kontrol terhadap lembaga LPD. Minimnya peran perempuan menyebabkan mereka mengalami kekurangan informasi tentang kegiatan LPD. Dengan kata lain kaum perempuan kurang mempunyai suara dalam pengambilan keputusan di rapat-rapat LPD dan bahkan cenderung menyerahkan keputusan kepada laki-laki terutama tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Berdasarkan bahasan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tercipta beberapa pertanyaan penting yang mendasari penelitian, yaitu:

1. Apa arti penting Kelompok Afinitas Mandiri bagi pengembangan masyarakat desa?
2. Sejauh mana kesetaraan gender yang terbentuk pada Kelompok Afinitas Mandiri setelah program PIDRA terlaksana?
3. Apa pengaruh dari kesetaraan gender yang tercipta terhadap proses pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga anggota maupun kelompok?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan arti penting Kelompok Afinitas Mandiri bagi masyarakat desa.
2. Mendeskripsikan kondisi kesetaraan gender yang terbentuk pada Kelompok Afinitas Mandiri penerima program PIDRA.

3. Mendeskripsikan pengaruh dari kondisi kesetaraan gender terhadap proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga anggota dan kelompok.

### Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya tentang kesetaraan gender dan keberdayaan pada kelompok afinitas Program PIDRA.
2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan sehubungan dengan kesetaraan gender dan keberdayaan pada kelompok afinitas Program PIDRA.
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan, kesetaraan gender dan keberdayaan kelompok afinitas Program PIDRA.

### METODE PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pada kelompok yang telah mengikuti Proyek Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelompok tersebut merupakan kelompok yang sejak tahun 2001 8 aktif mengikuti Program PIDRA.

Dalam penelitian ini, sebagai unit analisis adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang tergabung dalam kelompok afinitas mandiri yang mengikuti Proyek pengembangan partisipasi lahan kering terpadu (PIDRA) di Desa Sukorame Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Kesetaraan gender pada kelompok afinitas dianalisis dengan cara dibandingkan satu sama lain antar individu dengan konteks jenis kelamin (*comparative analysis*). Kesetaraan gender pada kelompok afinitas merupakan kajian utama dalam tingkatan analisis yang berarti bahwa dalam mengkaji permasalahan penelitian berdasarkan fakta, pengalaman, ide-ide dan persepsi kelompok afinitas sebagai unit analisis. Proses pengolahan dan analisis data meliputi tahap-tahap penyuntingan data secara manual, tabulasi data secara manual, penyusunan tabel analisis, dan pengolahan data dengan menggunakan deskripsi tabel silang (*cross tab analysis*) yang meliputi variabel kesetaraan gender dalam kelompok afinitas, pengambilan keputusan, serta hubungan antara kesetaraan gender dengan pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan kelompok afinitas.

Selain itu juga digunakan analisis deskriptif, yaitu analisis untuk menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Sanapiah, 1999). Dalam menganalisis data, peneliti berpedoman pada konsep Miles dan Huberman, 1982 (dalam Ngabut, 1999) yakni dengan tetap menggunakan kata-kata yang sebenarnya kemudian disusun ke dalam teks yang diperluas.

Dalam analisa ini terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan antara lain, yang pertama, reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua, penyajian data, diartikan sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, yakni penarikan kesimpulan/verifikasi, diartikan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung.

### HASIL PENELITIAN

Keberdayaan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari *power* (daya), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya, setiap individu dilahirkan dengan daya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antar satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang saling terkait (*interlinking factors*) antara lain seperti: pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kaya miskin, laki-laki-perempuan, guru-murid, pemerintah-warganya, antar agen pembangunan dengan si miskin, dan lain sebagainya.

Individu yang memiliki *interlinking factors* yang tinggi atau kuat cenderung memiliki daya yang lebih banyak. Dengan kata lain, semakin dekat individu tersebut pada *centrum of power*, maka daya yang dimilikinya akan semakin banyak. Argumentasi ini dapat dipakai untuk menganalisis mengapa orang itu miskin. Kemiskinan tidak semata-mata merupakan gejala tidak dimilikinya “sumber hidup” tetapi merupakan bentuk *dis-empowerment* yang dilakukan subyek terhadap obyek demi menjaga *status quo* mereka. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang menjadi obyek perbaikan melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan proses pematahan atau *breakdown* dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya “pengakuan” subyek akan “kemampuan” atau “daya” (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini melihat penting mengalirnya daya (*flow of power*) dari subyek ke obyek. Pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberi kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan manifestasi dari mengalirnya daya tersebut. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat “mewujudkan” harapannya dengan diberikannya “pengakuan” oleh subyek merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Dengan kata lain, mengalirnya daya ini dapat berwujud suatu upaya dari obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki subyek.

Seringkali, mengalirnya daya untuk mengalih-fungsikan individu miskin yang semula obyek menjadi subyek ini tidak dapat terwujud dengan baik. Kondisi tersebut dapat memunculkan *countervailing power* dari obyek yang dipakai untuk menantang (merupakan proses kesadaran dari obyek akan haknya yang ditekan serta berlaku pula suatu proses penyadaran subyek atas perilakunya menekan obyek) terhadap konfigurasi daya (*power*) yang sudah mapan (berdaya). Proses tersebut juga berkaitan dengan penciptaan *assets* (baik itu sifat, materi, kemampuan, dsb), yaitu menciptakan suatu dasar ekonomi minimum untuk kelompok yang selama ini termarjinalkan. Asumsinya, dengan peningkatan taraf hidup melalui penciptaan *assets* tersebut, lapisan miskin akan memiliki campur tangan yang lebih kuat dalam proses pembangunan.

Definisi kelompok tidak terlepas dari elemen keberadaan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Suatu masyarakat mengacu pada tata hukum, norma moral, adapt istiadat dan sebagainya. Sedangkan kelompok (*group*) mengacu pada kelembagaan (*institutions*) atau pranata. Berkaitan dengan itu, Shaw (1979) menetapkan daya ikat dan daya tarik sebagai salah satu ciri kelompok. Salah satu ciri kelompok (selain daya ikat dan daya tarik) adalah interaksi tadi dapat dilihat dalam beberapa tipe interaksi yang terjadi antar sesama anggota kelompok. Dari bentuk interaksi yang dominan dalam sebuah kelompok akan menentukan pola kelompok yang berbeda-beda pula, seperti akan terbentuknya kelompok kooperatif, kelompok kompetitif, kelompok konflik dan kelompok akomodasi. Semua pola kelompok yang disebutkan tadi tidak ada yang dikategorikan sebagai kelompok yang paling baik (ideal) atau sempurna.

Meskipun konsep-konsep kelompok, seperti: ukuran kelompok, pola hubungan kekuatan dalam kelompok, sikap apatis, sikap permusuhan dan keterikatan kelompok telah banyak mendapat perhatian luas dalam beberapa buku teks, namun variable-variabel kelompok kecil yang mendapat perhatian paling besar dalam buku-buku teks tentang diskusi yang baru adalah peranan, norma kelompok, iklim sosial serta penyesuaian atau tekanan kelompok. Konsep-konsep tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Peranan. Kebanyakan studi-studi terutama yang telah dibukukan, mengartikan peranan sebagai fungsi-fungsi yang dilakukan anggota dalam kelompok. Fungsi-fungsi ini antara lain adalah memberi pendapat, menjelaskan penilaian anggota baru atau anggota lain, atau bermacam tugas serta proses tingkah laku lain.

*Kedua*, Norma-norma kelompok. Norma-norma mengatur tingkah laku kelompok. Norma terdiri dari gambaran tentang bagaimana seharusnya mereka bertingkah laku. Norma terbagi dalam pola-pola dan menjadi aspek-aspek yang dapat diperkirakan dari kegiatan maupun segi pandangan kelompok.

*Ketiga*, Iklim Sosial. Suasana atau iklim sosial mengacu pada ciri-ciri khas interaksi anggota dalam kelompok. Iklim sosial bisa formal dan bisa pula informal, santai atau tegang, gembira atau sedih dan sebagainya. Iklim sosial dalam suatu kelompok mencerminkan sistem norma kelompok tersebut. Beberapa kelompok mungkin mempunyai iklim kelompok yang sangat kooperatif, sedangkan kelompok lain mungkin sangat kompetitif. Pada segi lain, suatu kelompok mungkin saja mempunyai iklim kelompok yang anarkis, ritualistik atau saling tergantung.

*Keempat*, Penyesuaian. Kecenderungan suatu kelompok untuk selalu memberi tekanan anggotanya menyesuaikan diri dengan norma-norma dan pedoman kelompok sudah lama dikenal. Anggota yang menyimpang dari norma-norma kelompok akan didorong untuk merubah tingkah lakunya dan dalam beberapa kasus, apabila anggota tidak mentaatinya, ia akan dihukum. Penyesuaian seperti halnya desakan untuk menyesuaikan, menjelma dengan sendirinya dalam tingkah laku komunikasi anggota kelompok. Oleh sebab itu sudah seharusnya berpaling pada suatu pengamatan terhadap cara-cara, buku-buku teks tentang kelompok diskusi, menggali proses komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil tersebut.

Konsep gender dalam kelompok mengembangkan dua pendekatan, yaitu peran gender dan analisa hubungan sosial. Fokus pendekatan peran gender terutama pada distribusi dan sumber daya (*resources*) dalam kelompok. Pendekatan ini berusaha secara sistematis meneliti kegiatan laki-laki dan perempuan agar mengatasi stereotipe dan ideologi yang menjadikan pekerjaan perempuan tidak terlihat serta argumentasi ekonomi dengan memberikan prasarana kepada kaum perempuan. Sedangkan, dalam pendekatan analisa hubungan sosial, hubungan gender merujuk terutama pada dimensi hubungan sosial yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam kedudukan laki-laki dan perempuan dalam proses sosial. Permasalahan yang mendasar dalam pendekatan ini bukanlah integrasi wanita dalam pembangunan, tetapi perubahan struktur sosial, proses, dan hubungan yang tidak menguntungkan bagi posisi perempuan. Pendekatan ini melihat sub-ordinasi perempuan bukan hanya sebagai masalah re-alokasi sumber-sumber ekonomi, tetapi lebih sebagai masalah redistribusi kekuasaan (*redistributing power*). Implikasi hubungan kekuasaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperbaiki posisi kaum wanita dengan memberdayakannya (Tan, 1995).

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalannya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran dan tanggung jawab kedua jenis kelamin itu. Permasalahan umum yang diakibatkan karena kesenjangan gender atau ketimpangan gender seperti, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan kontrol atas sumberdaya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan.

Gambaran umum tentang kondisi objektif perempuan masih memprihatinkan. Pertama, di bidang kesehatan, tenaga medis dan paramedis perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Kedua, bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama antara perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh, tetapi pada pendidikan tingkat menengah keatas dan pendidikan tinggi mulai tampak perbedaan, dimana laki-laki lebih memperoleh kesempatan. Ketiga, dibidang ekonomi dan pekerjaan, partisipasi perempuan hanya 43,5 % yang terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan segala sektor, sedangkan sisanya tidak memperoleh kesempatan memiliki pekerjaan. Keempat, struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat belum mendukung terciptanya kesetaraan gender. Kelima, di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih rendah.

Pemberdayaan merupakan pendelegasian secara sosial dan etika moral. Menurut Cook dan Macaulay (1997) (dalam Sustiyonadi, 2002), kerangka dasar pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dalam akronim “**ACTORS**” yang terdiri atas : 1) *Authority* adalah kelompok atau masyarakat diberi kewenangan (otoritas) untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan ; 2) *Confidence and Competence* adalah membantu masyarakat agar lebih percaya diri dan memiliki kompetensi untuk berkembang ; 3) *Trust* adalah menimbulkan keyakinan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk melakukan perubahan ke arah kemajuan ; 4) *Opportunity* adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan apa yang dianggap paling baik untuk dikerjakan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ; 5) *Responsibility* adalah memotivasi masyarakat agar mereka melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab ; serta 6) *Support* adalah



dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten untuk membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

### KESIMPULAN

Hasil kondisi objektif perempuan masih memprihatinkan. Pertama, di bidang kesehatan, tenaga medis dan paramedis perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki. Kedua, bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama antara perempuan dan laki-laki tidak berbeda jauh, tetapi pada pendidikan tingkat menengah keatas dan pendidikan tinggi mulai tampak perbedaan, dimana laki-laki lebih memperoleh kesempatan. Ketiga, dibidang ekonomi dan pekerjaan, partisipasi perempuan hanya 43,5 % yang terkonsentrasi pada lapangan pekerjaan segala sektor, sedangkan sisanya tidak memperoleh kesempatan memiliki pekerjaan. Keempat, struktur hukum yang terdapat dalam masyarakat belum mendukung terciptanya kesetaraan gender. Kelima, di bidang politik, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik masih rendah.

### REFERENSI

- Budiman, A. 1985. Pembagian Kerja Seksual. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansoer. 1997. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firmansyah Saca. 2009. Partisipasi Masyarakat. Wordpress. Diakses pada tanggal 8 April 2012
- Junaidi, Moch. Agus. 2006. Keberdayaan dan Kemandirian Kelompok Afinitas (kasus pada Program Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu di Desa Sukorame, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). Tesis. Universitas Brawijaya Press. Malang
- Kusumo, W. Sardono. 2005. Aceh Kembali Kemasa Depan. Jakarta: Institut Kesenian Jakarta. Megawangi
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas). Rineka Cipta. Yogyakarta
- Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda. Bandung: Mizan
- Rahmawati, Ika. 2003. Modul Analisis Gender. Jakarta: The Asia Foundation
- Sadawi, Nawal, L. 2001 Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Jakarta: Pustaka Pelajar